

## ABSTRAK

**Nurbainah**, 2022. *Konsep Demokrasi Di Indonesia Menurut Etika Politik Imam Al-Ghazali* Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Pembimbing : (I) Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si., (II) Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.

**Kata kunci** : Demokrasi, Etika, Politik, Al-Ghazali

Demokrasi merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah, serta yang mengontrol kehidupan kenegaraan. Sedangkan menurut al-Ghazali kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan. Maksudnya ialah kekuasaan tertinggi itu atas legistimasi religius atau berdasarkan hukum-hukum Allah. Karena menurut al-Ghazali kepala negara merupakan pelindung Allah dimuka bumi yang tentunya berkewajiban untuk menggunakan hukum-hukum Allah dalam mengontrol semua proses kenegaraan.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi awal bahwa konsep demokrasi dalam pandangan etika politik Imam al-Ghazali memiliki kontradiksi mengenai sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian-penelitian yang lebih spesifik mengenai konsep demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali. Apakah memang benar konsep demokrasi di Indonesia memang seratus persen bertolak belakang dengan sistem pemerintahan yang Imam al-Ghazali kehendaki.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library reseacrh), dengan teknik diskriptif analitik. Sedangkan sumber data primer yang digunakan adalah salah satu kitab Imam al-Ghazali yang berjudul Al- Tibr Al-Masbuk Fi Nasihat Al-Mulk terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah Tahun 1988.

Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang ditemukan. Pertama, sistem pemerintahan dari,oleh dan untuk rakyat secara makna sangat tidak sejalan dengan sistem pemerintahan yang digagas oleh al-Ghazali, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan Tuhan. Yang artinya segala ketentuan yang menyangkut tata kelola pemerintahan berdasarkan legistimasi religius atau berdasarkan syari'at Islam. Kedua, Secara makna sistem pemerintahan yang digagas al-Ghazali tidak sejalan dengan konsep demokrasi. Tetapi dalam segi praktek dan implementasi sistem pemerintahan yang digagas oleh al-Ghazali juga tidak seratus persen bertolak belakang dengan sistem demokrasi Indonesia. Sebab dalam segi praktek kenegaraan sistem pemerintahan al-Ghazali juga terdapat prinsip dan ciri dari negara demokrasi.